

Lampiran : Surat Direktur

No :

Perihal : *Permintaan Daftar Informasi Publik Yang
dikecualikan dilingkungan Pemerintah
Kota Bandung*

Tanggal : 14 Maret 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RSUD KOTA BANDUNG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Biodata elektronik pegawai (database)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Daftar nilai SKP PNS	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	1 tahun	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Daftar kekayaan, keuangan, asset dan pendapatan/ rekening bank PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang Melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
8	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan	PP No. 9 Th. 2003 ttg Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai	Sampai diterbitkannya SK	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

	fungsi tertentu, fungsi umum dan Non PNS	PERWAL Kota Bandung No.1335 Tahun 2017 ttg Pengadaan dan Pengelolaan Sumber daya Manusia pada Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan		jabatan fungsi tertentu dan fungsi umum. Dan juga dapat menghambat proses pengadaan dan pengelolaan BLUD di Lingkungan RSUD Kota Bandung	
9	Data rekam medis pasien Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan - UU No. 39 Tahun 1999 ttg Hak Asasi Manusia - PP No. 26 Th. 1977 ttg Pengujian Kesehatan PNS - Permenkes No. 269/mankes/PER/III/2008 ttg Rekam Medis 	<ul style="list-style-type: none"> - Hingga pasien meninggal dunia - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi
10	Hasil Uji Kesehatan Pegawai	PP No 26 Tahun 1977 Tentang Pengujian Kesehatan PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Terbatas - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi
11	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia(SR) dan rahasia (R) dan Kofidensial	Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Daerah	Hingga proses surat tersebut selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kebijakan pimpinan - Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja - Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa
12	Rincian Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres No. 54 tahun 2010 ttg Pengadaan barang dan jasa pasal 66 - Perpres no. 70 tahun 2012 ttg Pengadaan barang dan jasa 	Selama proses pengadaan barang/ jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan penilaian yang tidak objektif - Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat 	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga
13	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres No. 54 tahun 2010 ttg Pengadaan barang dan jasa pasal 66 - Perpres no. 70 tahun 2012 ttg Pengadaan barang dan jasa 	Selama proses pengadaan barang/ jasa	Muncul pesaing tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian

14	Kode Akses elektronik aplikasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dari Penyalahgunaan oleh pihak lain
15	Dokumen Belanja	- UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara - UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Permendagri No 13 tahun 2006	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak lain	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak lain
16	Laporan Hasil Pemeriksaan \	- Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 51 Tahun 2006 - Peraturan Mendagri No. 51 Tahun 2010	Mendapat persetujuan Pihak yang Berwenang	Menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/penilaian antar birokrasi dan masyarakat pada umumnya	Rekomendasi pernyataan yang dimuat dalam LHP dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan system tata kelola
17	Lokasi Server	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindakan criminal, pengrusakan, pencurian data	Mengamankan perangkat serta data
18	Internet Protocol/ IP Address Private	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tidak terbatas	Penerobosan/ Penyalahgunaan Hak Akses	Melindungi Hak Akses
19	Bandwidth Management	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Kapasitas Bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan Bandwidth
20	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE - UU No 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
21	System management Database	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE - UU No 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Database

Bandung, 14 Maret 2022

DIREKTUR RSUD KOTA BANDUNG



drg. Mulyadi, Sp.Ort

NIP. 19640616 199011 1 002